



PENGARUH DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI GORONTALO

Ristanto Abdullah¹⁾

Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo¹

Email:ristanto.abdullah@kemenkeu.go.id¹

ABSTRAK

Banyak ragam program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan, khususnya di Gorontalo. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari BPS dan Kementerian Keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan *Eviews 12*. Model terpilih yaitu *Fixed Effect Model*. Penelitian menggunakan Tingkat Kemiskinan sebagai variabel dependen. Sementara variabel independen utama adalah Dana Desa, disertai variabel independen penjelas yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik. Data variabel yang digunakan adalah periode tahun 2015-2021. Hasil penelitian menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan ($p\text{-value}=0,0048$) dengan arah hubungan negatif (koefisien=-1.222113) terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo.

Kata Kunci: DAK Fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Tingkat Kemiskinan

ABSTRACT

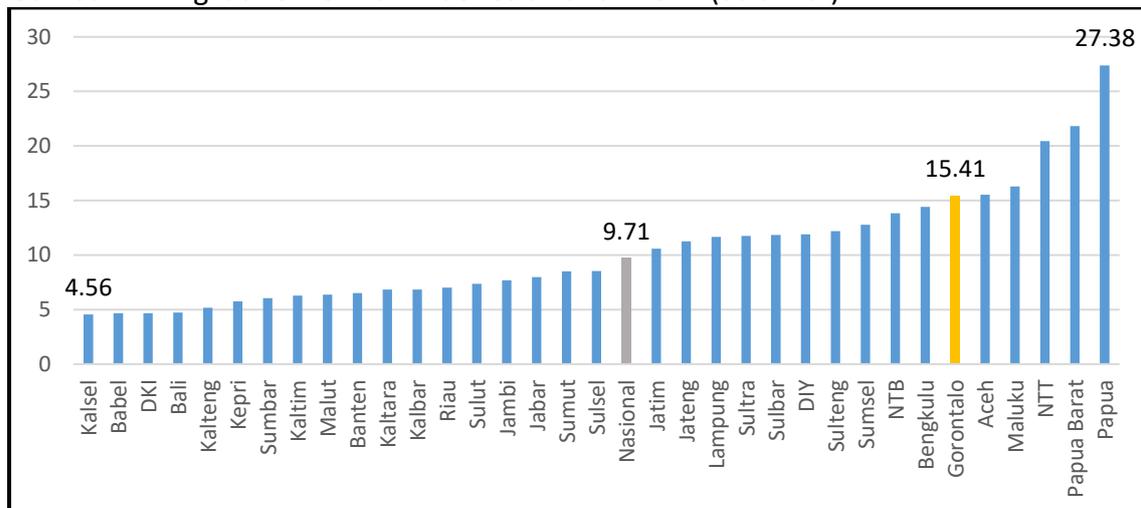
There are many kinds of government programs in the context of alleviating poverty, one of which is the Village Fund. This study aims to determine the effect of the Village Fund on the Poverty Level, especially in Gorontalo. The research uses quantitative methods with secondary data from BPS and the Ministry of Finance. The analysis technique used is panel data regression with Eviews 12. The selected model is the Fixed Effect Model. This study uses the Poverty Level as the dependent variable. Meanwhile, the main independent variable is the Village Fund, accompanied by an explanatory independent variable, namely the Physical and Non-physical Special Allocation Fund. The variable data used is the 2015-2021 period. The results of the study found that the Village Fund had a significant effect ($p\text{-value} = 0.0048$) with a negative relationship direction (coefficient = -1.222113) on the Poverty Level in Gorontalo.

Keywords: *Physical and Non-physical Special Allocation Fund, Poverty Level, Village Fund*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan kehidupan bernegara adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Pencapaian tersebut diukur dengan beberapa indikator kesejahteraan, salah satunya adalah Tingkat Kemiskinan. Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat target pemerintah untuk Tingkat Kemiskinan Nasional yaitu sebesar 6-7%. Upaya pencapaian target tersebut memerlukan *extra effort* mengingat Tingkat Kemiskinan pada tahun 2021 berada pada angka 9,71%. Hal tersebut sebenarnya tidak lepas dari kejadian *extra ordinary* yaitu pandemi *Covid-19*. Bahkan pada tahun 2020, Tingkat Kemiskinan yang selama ini berada pada satu digit, menjadi dua digit yaitu 10,19%.

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2021 (dalam %)



Sumber: Hasil olah data sekunder (BPS)

Salah satu daerah dengan Tingkat Kemiskinan melebihi rata-rata Nasional adalah Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2021, Tingkat Kemiskinannya mencapai 15,41%, atau berada di peringkat 6 terbawah dari seluruh provinsi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2017-2022, masih diperlukan upaya ekstra untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain sekaligus mencapai target di akhir periode RPJMD pada tahun 2022, yaitu 14,69%.

Berbagai program pemerintah diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan melalui APBN, baik itu melalui Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Salah satu komponen TKDD adalah Dana Desa, yang salah satunya merupakan program untuk menanggulangi kemiskinan.

Hal-hal tersebut menarik perhatian penulis, yang saat ini sedang bertugas di Gorontalo, untuk melakukan analisis pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. Selain Dana Desa, penulis juga menyertakan variabel lain sebagai penjelas yang merupakan komponen TKDD yang lain, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), yang meliputi DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

Terdapat beberapa penelitian yang telah menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan di berbagai lokasi di Indonesia. Arfiansyah (2020), Putra (2019), Ritonga dkk. (2021), Sigit dkk. (2020) menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan arah hubungan negatif di berbagai daerah di

Indonesia. Terdapat juga penelitian yang menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan namun dengan arah hubungan yang positif, penelitian ini dilakukan oleh Tarmizi & Miksalmina (2020), Wahyuddin dkk. (2019), Handayani (2019), serta Wijaya dkk.(2018). Di sisi lain terdapat juga penelitian yang menemukan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Penelitian ini dilakukan oleh Harmiati dkk. (2019), Lalira dkk. (2018), serta Artino dkk. (2019).

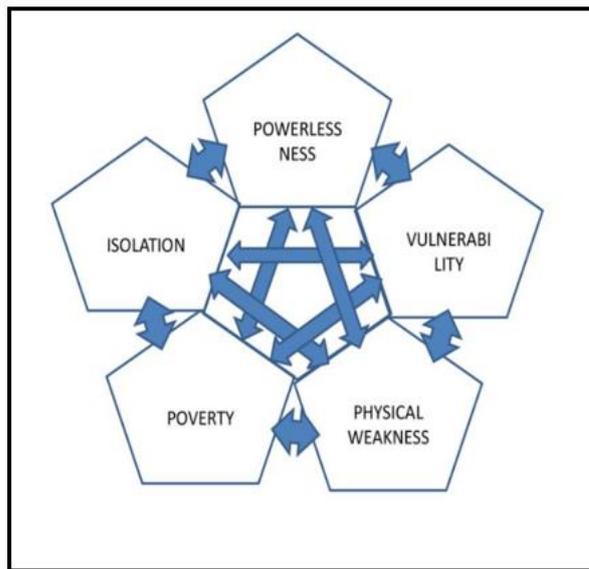
Untuk variabe DAK, penelitian yang dilakukan Putra (2019) serta Gumelar & Khairina (2021) menemukan bahwa DAK berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif. Sementara itu Andriawan, dkk. (2022) serta Rasu dkk. (2019) menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Di penelitian lain, Ismail & Hakim (2014) menemukan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan namun arah hubungannya adalah positif.

Dari jabaran di atas, dapat diketahui bahwa telah dilakukan banyak penelitian namun menghasilkan penemuan yang beragam atau terdapat *gap* penelitian. Berdasarkan hal-hal dimaksud, penelitian akan berfokus untuk menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo dengan menambahkan variabel DAK, baik DAK Fisik maupun DAK Nonfisik untuk periode waktu tahun 2015 s.d. 2021.

Musuh utama yang dihadapi oleh pembangunan adalah keterbelakangan, ketidakberdayaan, ketergantungan, kebodohan, rendahnya kesehatan yang semuanya bermuara pada kemiskinan (Hasan & Azis, 2018). Menurut Mulyani (2017) kemiskinan adalah rendahnya taraf kehidupan suatu masyarakat. Sementara itu, Chambers (1984) mengemukakan bahwa kemiskinan terdiri dari lima unsur yaitu *poverty* (kemiskinan), *physical weakness* (kelemahan fisik), *isolation* (isolasi), *vulnerability*(kerentanan), dan *powerlessness* (ketidakberdayaan). Seluruh kluster tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi, disebut *The Deprivation Trap* (Gambar 2). Melihat hubungan tersebut, kemiskinan merupakan masalah multi dimensi dengan berbagai masalah yang sangat kompleks.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Gambar 2. The Deprivation Trap



Sumber: Chambers (1984)

mengalokasikan dana transfer ke daerah. Menurut Nursadi (2009) transfer dana pemerintah ke daerah menunjukkan dimulainya suatu hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Transfer tersebut diperlukan antara lain untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan menjaga standar pelayanan minimal di daerah.

Di sebagian besar negara kesatuan, di mana pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang terbatas, mereka sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Ter-Minassian, 1977). Di Indonesia hubungan keuangan pusat-daerah tersebut diatur dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut regulasi tersebut, Transfer ke Daerah merupakan dana APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Salah satu unsur transfer ke daerah adalah Dana Desa. Kemunculan Dana Desa ini merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pembangunan Desa yang salah satunya dibiayai dengan Dana Desa mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (Republik Indonesia, 2014). Dalam APBN, Dana Desa dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitas geografis. Dana Desa ini mulai dialokasikan pada tahun 2015.

Unsur dana transfer yang lain adalah DAK, yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu arah kebijakan penggunaan DAK yang merupakan bagian dari TKDD adalah mengurangi Tingkat Kemiskinan di daerah. DAK sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

Menurut Mulyani (2017) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu merosotnya standar perkembangan pendapatan per kapita secara global, biaya kehidupan tinggi, dan pembagian subsidi *income* pemerintah yang kurang merata.

Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan mengentaskan kemiskinan. Banyak program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Untuk mengentaskan kemiskinan di daerah, pemerintah pusat

DAK Fisik menurut Perpres Nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Republik Indonesia, 2022a). Terdapat dua jenis DAK Fisik, yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan (Kementerian Keuangan RI, 2021b). DAK Fisik Reguler meliputi beberapa bidang, yaitu pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, jalan, air minum, sanitasi serta perumahan dan permukiman. Dari jenis-jenis DAK Fisik Reguler tersebut, yang sebagian besar merupakan proyek infrastruktur, sangat dimungkinkan manfaat langsungnya bagi pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu yang tidak pendek.

Sementara DAK Fisik Penugasan juga terdiri dari bermacam-macam bidang yang bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. DAK Fisik Penugasan sendiri meliputi beberapa tema pembangunan, antara lain tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah dan tema pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani. Dilihat dari jenis kegiatannya, penguatan sentra sektor pariwisata dan sentra industri kecil, akan membawa dampak langsung terhadap kehidupan di masyarakat. Demikian halnya dengan penguatan *food estate* dan sentra produksi pertanian dan perikanan, diyakini ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo yang sampai saat ini sektor tersebut masih menjadi sektor unggulan daerah (Badan Pusat Statistik, 2022).

DAK Nonfisik menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah (Kementerian Keuangan RI, 2021a). DAK Nonfisik antara lain terdiri dari: Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Bantuan Operasional Kesehatan dan KB, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM, Dana Fasilitas Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan sentra IKM. Dari berbagai jenis kegiatan DAK Nonfisik, diharapkan kegiatan untuk peningkatan kapasitas koperasi UKM, fasilitas permodalan, dan penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM mampu menggerakkan perekonomian daerah yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dengan kegiatan untuk ketahanan pangan dan pertanian, ini akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat Gorontalo di mana sektor tersebut masih sangat dominan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi.

Dari paparan di atas, terlihat bahwa dana-dana transfer tersebut dialokasikan kepada daerah untuk menyelenggarakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diantaranya adalah pengentasan kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan penulisan sebagai berikut: (a) mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan; (b) mengetahui pengaruh DAK Fisik terhadap Tingkat Kemiskinan; dan (c) mengetahui pengaruh DAK Nonfisik terhadap Tingkat Kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder dari BPS dan Kementerian Keuangan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen yang berasal dari laman kedua institusi di atas. Penelitian menggunakan teknik analisis data kuantitatif berupa analisis statistik inferensial dengan maksud untuk mendapatkan simpulan dari variabel-variabel yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Data dimaksud di atas berupa realisasi Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK Nonfisik dari Kementerian Keuangan dan Tingkat Kemiskinan dari BPS. Data realisasi Dana Desa, DAK Fisik dan DAK Nonfisik diambil untuk periode 2015 s.d. 2020 (Kementerian Keuangan RI, 2022). Sementara Tingkat Kemiskinan diambil data periode 2016 s.d. 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022).

Perbedaan tahun pengambilan data di atas, dimaksudkan untuk menjaga akurasi pengaruh data. Hal ini karena untuk data realisasi anggaran, pada tahun-tahun awal penyaluran Dana Desa, baru disalurkan pada bulan April, sementara Susenas yang dilakukan BPS untuk data kemiskinan di tingkat kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret. Jadi tidaklah tepat kiranya jika pengaruh Dana Desa diukur langsung pada tahun yang sama, karena saat pengukuran Kemiskinan, Dana Desa belum diterima oleh masyarakat Desa. Maka penulis menggunakan data Tingkat Kemiskinan pada periode satu tahun setelah penerimaan Dana Desa.

Data diambil untuk seluruh pemerintah daerah kabupaten lingkup Provinsi Gorontalo. Terdapat 5 kabupaten penerima Dana Desa di Gorontalo, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Analisis data menggunakan regresi data panel dengan alat bantu *Eviews 12*. Variabel dependen adalah Tingkat Kemiskinan dan variabel independen utama adalah Dana Desa. Terdapat variabel independen penjelas lain yang digunakan, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Kemiskinan_t = \alpha + \beta_{1t-1}DD + \beta_{2t-1}DF + \beta_{3t-1}DNF + \varepsilon$$

Dimana DD = Dana Desa, DF = DAK Fisik, dan DNF = DAK Nonfisik. Penelitian yang menggunakan data keuangan khususnya rasio keuangan, harus berhati-hati dalam melakukan analisis (Halim, 1999). Data variabel di atas merupakan data campuran, variabel dependen (Kemiskinan) merupakan rasio jumlah orang miskin. Sementara variabel independen (DD, DF, dan DNF) menggunakan satuan mata uang. Agar diperoleh persamaan yang setara, maka variabel independen akan dirubah menjadi *logaritma natural* (LN). Metode yang sama pernah digunakan oleh (Ismail & Hakim, 2014), sehingga persamaan regresi menjadi:

$$\widehat{Kemiskinan}_t = \alpha + \beta_{1t-1}LNDD + \beta_{2t-1}LNDF + \beta_{3t-1}LNDNF$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Regresi Data Panel

Untuk mendapatkan hasil dari persamaan regresi di atas, data diolah menggunakan

Eviews 12. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat estimasi persamaan *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Selanjutnya adalah memilih model yang paling sesuai, yaitu melakukan uji secara bertahap dengan Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Langrange Multiplier* terhadap model-model tersebut.

Tabel 1. Hasil Pengujian Keseuaian Model

Uji	Prob.	Keputusan
Chow Test	0.0000	FEM
Hausman Test	0.0000	FEM

Sumber: Hasil olah data sekunder (*Eviews 12*)

Berdasarkan Uji *Chow*, model terpilih adalah FEM. Kemudian dilanjutkan dengan Uji *Hausman*, dan terpilih model FEM. Karena yang terpilih pada Uji *Hausman* adalah model FEM, maka tidak perlu dilakukan Uji *Langrange Multiplier*. Melalui uji bertahap tersebut, disimpulkan bahwa model yang tepat untuk menggambarkan Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK Nonfisik adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.

Untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi terpilih benar-benar tepat, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik, yaitu: Autokorelasi, Normalitas, Multikolinearitas, dan Heterokedastisitas. Uji Autokorelasi menggunakan Uji *Durbin-Watson (DW Test)*. Berdasarkan tabel DW diperoleh nilai $dL=1,2138$ dan $dU=1,6498$, sementara itu nilai dari $(4-dL)=2,7862$ dan nilai $(4-dU)=2,3502$. Dengan nilai $DW=2,014910$, berarti $du < DW < (4-dU)$, jadi dapat disimpulkan tidak terjadi masalah Autokorelasi dari persamaan regresi tersebut. Pada Uji Normalitas, menggunakan koefisien *Probibality Jarque-Berayang* menunjukkan angka 0.948774 atau di atas 5%. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan adalah model yang normal.

Pada Uji Multikolinearitas, dilakukan uji korelasi antar variabel independen. Hasilnya menunjukkan masing-masing angkanya di bawah 0,8. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen. Selanjutnya, pada Uji Heteroskedastisitas digunakan uji *residual absolut*. Diperoleh hasil bahwa semua nilai probabilitas di atas 5%. Hal ini menunjukkan pada persamaan tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 2. Ringkasan Statistik Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	t-hitung	p-value
C	118.1249	6.156126	0.0000
LNDD	-1.222113	-3.135969	0.0048
LNDF	-0.942094	-1.536238	0.1387
LNDNF	-1.802431	-3.451038	0.0023
R-squared			0.838470
Adjusted R-squared			0.787075
F-statistic			16.31400
Prob(F-statistic)			0.000000
Durbin-Watson stat			2.014910

Sumber: Hasil olah data sekunder (*Eviews 12*)

Menurut hasil di atas, maka persamaan hubungan Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK Nonfisik terhadap Tingkat Kemiskinan adalah sebagai berikut:

$$\text{KEMISKINAN} = 118,1249 - 1,1222113\text{LNDD} - 0,942094\text{LNDF} - 1,802431\text{LNDFN}$$

Untuk pengujian pengaruh secara simultan menggunakan uji *F-Statistic*. Diperoleh hasil bahwa variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Di sisi lain, untuk uji parsial dengan tingkat signifikansi 5%, variabel Dana Desa dan DAK Nonfisik berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, dengan arah hubungan negatif. Sementara itu variabel DAK Fisik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Koefisien Determinasi yang tercermin dari nilai *Adjusted R-squared* menunjukkan nilai 0,7871, Hal ini mengandung makna bahwa 78,71% Tingkat Kemiskinan mampu dijelaskan oleh variabel Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK Nonfisik. Sementara itu, sebesar 21,29% (100%-78,71%) dipengaruhi oleh variabel lain.

B. Pembahasan

Analisis Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan

Sesuai dengan hasil regresi terpilih, variabel Dana Desa mempunyai pengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif. Hal ini mengandung makna bahwa ketika Dana Desa naik maka Tingkat Kemiskinan akan menurun. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020), Putra (2019), Ritonga dkk. (2021), Sigit dkk. (2020) yang menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan arah hubungan negatif di berbagai daerah di Indonesia.

Seperti telah dijelaskan di atas, Dana Desa diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sesuai hubungan di atas, Dana Desa mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan dengan Dana Desa banyak yang berkaitan dengan sektor pertanian dan kelautan. Sektor tersebut memang merupakan sektor unggulan di Gorontalo. Jadi pembangunan di kedua sektor tersebut selaras dengan arah pembangunan Gorontalo secara umum.

Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk pengembangan UMKM di desa. Hal ini tentunya sangat mendukung perekonomian di desa. Terdapat juga Dana Desa yang dimanfaatkan untuk membangun pariwisata desa, hal ini tentunya sangat mendukung aktivitas perekonomian di desa.

Yang tidak kalah penting, Dana Desa juga dialokasikan untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan di desa. Alokasi ini sangat berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat desa. Mungkin efeknya tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek, namun patut diyakini bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan akan mengangkat derajat kehidupan masyarakat desa.

Berdasarkan data BPS, pemerintah daerah yang masih perlu usaha lebih untuk mengentaskan kemiskinan adalah Kabupaten Boalemo. Selama 5 tahun terakhir, Tingkat

Kemiskinan Kabupaten Boalemo menempati peringkat teratas. Di sisi lain, Kabupaten Bone Bolango menjadi daerah dengan Tingkat Kemiskinan paling rendah.

Kiranya pemerintah daerah perlu memberi atensi khusus terhadap perbedaan Tingkat Kemiskinan tersebut dan mengupayakan cara yang lebih efektif dalam menggunakan Dana Desa untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Peran pemerintah Provinsi Gorontalo juga diperlukan untuk mendukung dan mendorong pemanfaatan Dana Desa agar mampu menjadi *tools* yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Gorontalo.

Satu hal yang cukup menarik dari Gambar 4 adalah adanya tren peningkatan Tingkat Kemiskinan pada periode tahun 2021. Hal ini diindikasikan merupakan dampak pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh wilayah di Indonesia semenjak tahun 2020, termasuk di Gorontalo. Namun untuk membuktikan dugaan tersebut, kiranya diperlukan penelitian lebih lanjut.

Analisis Pengaruh DAK Fisik terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi, DAK Fisik, yang merupakan bagian dari DAK, tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Temuan ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriawan dkk. (2022) serta Rasu dkk. (2019) yang menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik yang dialokasikan ke pemerintah daerah belum mampu secara nyata menanggulangi kemiskinan di Gorontalo. DAK Fisik Reguler yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, jalan, air minum, sanitasi serta perumahan dan permukiman belum mampu secara langsung mengentaskan kemiskinan di Gorontalo.

Demikian halnya dengan DAK Fisik Penugasan dengan tema-tema yang sangat dekat dengan pengentasan kemiskinan, masih belum mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. Tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah dan tema pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani seharusnya akan membawa dampak yang cukup berarti bagi kehidupan masyarakat di Gorontalo.

Saat ini, alokasi anggaran DAK Fisik menggunakan metode *proposal based* (Kementerian Keuangan RI, 2021b), pengusulan berdasarkan proposal dari pemerintah daerah. Diindikasikan, proposal yang diajukan pemerintah daerah masih belum selaras dengan kebutuhan program pengentasan kemiskinan. Kedepan pengusulan kegiatan DAK Fisik harus diselaraskan dengan sasaran pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan akademisi yang tentunya kaya akan khasanah ilmu tentang pengentasan kemiskinan maupun *stakeholder* lain yang kredibel dalam merumuskan usulan kegiatan DAK Fisik.

Analisis Pengaruh DAK Nonfisik terhadap Tingkat Kemiskinan

Untuk jenis DAK yang lain, yaitu DAK Nonfisik, berdasarkan hasil regresi dari model terpilih, menunjukkan bahwa DAK Nonfisik berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dengan arah hubungan negatif. Artinya saat DAK Nonfisik meningkat, Tingkat Kemiskinan akan menurun. Hasil ini selaras dengan temuan

penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019) serta Gumelar & Khairina (2021) yang menemukan bahwa DAK berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif.

Pemanfaatan DAK Nonfisik di Gorontalo terlihat nyata berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. Penggunaan DAK Nonfisik berupa Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM, Dana Fasilitas Penanaman Modal, Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan sentra IKM mampu menggerakkan perekonomian di perdesaan. Dengan adanya pergerakan ekonomi yang berkesinambungan, kesejahteraan masyarakat tentunya akan meningkat. DAK Nonfisik berupa Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mampu menopang kehidupan masyarakat perdesaan, di mana sektor produktif ini memang merupakan sektor unggulan di Gorontalo. Jadi keduanya selaras menguatkan dan mendukung masyarakat pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan hasil persamaan regresi, nilai koefisien DAK Nonfisik bahkan lebih besar daripada Dana Desa. DAK Nonfisik mempunyai nilai - 1,802431, sementara Dana Desa dengan nilai -1,1222113. Hal ini menunjukkan bahwa DAK Nonfisik mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan dibandingkan dengan Dana Desa. Dengan hasil tersebut, dukungan seluruh pemerintah daerah beserta *stakeholder* terkait terhadap peningkatan kualitas proposal dan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik menjadi sangat *urgent* karena akan lebih efektif untuk menurunkan Tingkat Kemiskinan di Gorontalo.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Dana Desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengurangan Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. Dengan peningkatan 1 persen Dana Desa akan mengurangi 1,1222113 persen Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. Sementara itu, DAK Fisik belum mampu memberikan pengaruh nyata terhadap Tingkat Kemiskinan. Di sisi lain, DAK Nonfisik juga berpengaruh signifikan dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. Kenaikan 1 persen DAK Nonfisik akan mengurangi 1,802431 Tingkat Kemiskinan di Gorontalo.

Yang perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya Tingkat Kemiskinan di Gorontalo dibandingkan dengan daerah lain. Pemerintah daerah di Gorontalo perlu melakukan akselerasi pemanfaatan Dana Desa dan DAK Nonfisik, agar efektivitasnya dalam menanggulangi kemiskinan menjadi semakin baik. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama akademisi dan *stakeholder* terkait, kiranya dapat mendorong dan mendukung pemanfaatan Dana Desa dan DAK Nonfisik agar lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan di seluruh wilayah Gorontalo. Untuk DAK Fisik, seyogyanya dalam mengusulkan kegiatannya dapat melibatkan akademisi dan *stakeholder* terkait agar kegiatan semakin fokus dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriawan, R., Rahman, A., & Iwang, B. (2022). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan*. 9.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1, 91–106.
- Artino, A., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Keterkaitan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Tataloka*, 21(3), 381. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.3.381-389>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Badan Pusat Statistik*. www.bps.go.id
- Chambers, R. (1984). *Rural development: Putting the last first*. Longman.
- Gujarati, D. N. (2011). *Econometrics by Example*. Palgrave Macmillan.
- Gumelar, A., & Khairina, N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019). *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(2), 342. <https://doi.org/10.35448/jequ.v11i2.13231>
- Halim, A. (1999). Aplikasi Clustering, MANOVA, dan Transformasi Data atas Data Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 1, 16.
- Handayani, D. (2019). Analisis Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kediri. *Universitas Brawijaya Malang*.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., & Utami, E. F. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu.
- Harmiati, H., Mulyadi, M., Suri, E. W., & Triyanto, D. (2019). Analisis Pemberian Dana Desa dalam Penurunan Angka Kemiskinan di Provinsi Bengkulu. *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 23. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v8i1.833>
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat (Kedua)*. CV. Nur Lina.
- Ismail, A., & Hakim, A. (2014). *Peran Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali*. 19.
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI. (2020). *Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*.
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI. (2022). *Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. 33.
- Kementerian Keuangan RI. (2021a). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik*.
- Kementerian Keuangan RI. (2021b). *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik*.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA)*. <https://djpk.kemenkeu.go.id//simtrada/>

- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). *Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. 18(04), 11.
- Mulyani, E. (2017). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Pertama). UNY Press.
- Nursadi, H. (2009). Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah: Transfer Pusat ke Daerah, Pemerataan Keuangan Daerah dan Kapasitas Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 254. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.191>
- Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. (2017). *Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022*.
- Putra, H. S. (2019). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2). <https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.30>
- Rasu, K. J. E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. M. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019>
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.
- Republik Indonesia. (2022a). *Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022*.
- Republik Indonesia. (2022b). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Ritonga, A., Handra, H., & Andrianus, F. (2021). Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sumatera Barat. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 277. <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.32968>
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 2, 15.
- Tarmizi, H., & Miksalmina. (2020). *Pengaruh Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh*. 11.
- Ter-Minassian, T. (1977). Decentralization and Macroeconomic Management. *IMF Working Paper*.
- Wahyuddin, W., Ramly, A., Djalil, M. A., & Indriani, M. (2019). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 16(2), 181. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2410>
- Wijaya, D. N., Arifin, Z., & Hadi, S. (2018). Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 11.